

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM
(Studi Kasus Putusan Nomor: 14./Pid./Prap/2015/PN/Tng)



OLEH :

SUPRAYITNO
NPM 201320252059

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM
(Studi Kasus Putusan Nomor: 14./Pid./Prap/2015/PN/Tng)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum**

OLEH :

**SUPRAYITNO
NPM 201320252059**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS

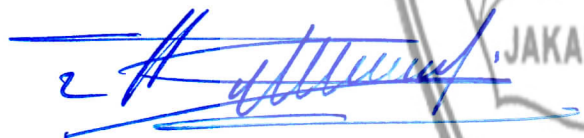
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM
(Studi Kasus Putusan Nomor: 14./Pid.Prap/2015/PN.Tng)

OLEH :

SUPRAYITNO
NPM 201320252059

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUJUI PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2016

Pembimbing I



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

Pembimbing II



Dr. M. Ibrahim, SH., MH

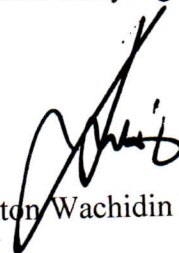
Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal: 29 Desember 2016

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor: SKEP/016/XII/2016/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

2. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : SUPRAYITNO
NPM : 201320252059
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF TEORI
HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor: 14./Pid.Prap/2015/PN.Tng)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

Pembimbing II



Dr. M. Ibrahim, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : SUPRAYITNO
NPM : 201320252059

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 29 Desember 2016



(SUPRAYITNO)

**LEMBAR PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRAYITNO
NPM : 201320252059
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Teori Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Prap/2015/PN.Tng)”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2016
Yang menyatakan,

(SUPRAYITNO)



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Pengalaman adalah guru paling baik.



Kupersembahkan Kepada :

1. Orang tuaku Tercinta.
2. Istri dan Anak-anakku tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Teori Hukum” (Studi Kasus Putusan Nomor : 14./Pid.Prap/2015/PN.Tng) dengan baik dan lancar. Penulisan Tesis hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu penulis mengangkat tema tersebut karena penulis merasa bahwa kecelakaan Lalu lintas semakin hari semakin meningkat jumlahnya yang berakibat orang luka-luka dan bahkan meninggal dunia. Sehingga perlu dilakukan pencegahan-pencegahan, dan sebagai langkah pencegahannya adalah memberikan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dan mudah-mudahan semua masyarakat dapat mengerti bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang, dengan harapan dimasa mendatang dapat mempermudah membangun bangsa yang adil dan sejahtera.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Tesis ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Drs. Bambang Karsono., S.H, M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Profesor I Made Widnyana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Dr. H. Muhammad Ibrahim, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan bagi penulis selama pembuatan Tesis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, Oktober 2016
Penulis,

Suprayitno

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa seluruh masyarakat, rakyat Indonesia harus patuh terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia, bahkan juga memaksa orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang ada di negara Indonesia. Hukum bersifat mengatur dan memaksa. karena aturan aturan yang berlaku tidak akan berguna apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat, sehingga agar aturan-aturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat maka hukum harus bersifat memaksa. *Equality before the law* (semua orang sama didepan hukum) adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara negara berkembang seperti Indonesia, maka dari itu asas ini dijadikan landasan bagi setiap manusia yang melakukan penegakan hukum di negeri ini tanpa terkecuali. Negara hukum merupakan negara yang berdasar atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan semata, dalam negara hukum kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi (*supremasi hukum/rule of law*). Dan rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kebijakan penegakan hukum lalu lintas, bila terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ? dan 2. Bagaimanakah penegakan hukum lalu lintas, bila terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?. Data yang diperoleh dengan cara studi pustaka atau dari literatur-literatur. yang meliputi : 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa : (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (3). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4). Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum/literatur. Adapun nama-nama literatur tersebut dicantumkan oleh penulis dalam Daftar Pustaka, Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, artikel ilmiah, dan lain-lain sebagai penunjang.

Kata Kunci : Penegakan Hukum

ABSTRAC

Indonesia is a country of law that have legal regulations that are forcing the entire community, the people of Indonesia must comply with the regulations or policies of law in Indonesia, even forcing foreigners residing in the territory of Indonesia to comply with the law in Indonesian country. Laws are set and force. because the rules of the applicable rules will be useless if not obeyed by the community, so that the applicable rules obeyed by the community then the law must be coercive. Equality before the law (all are equal before the law) is one of the most important principles of modern law. This principle became one of the joint doctrine of the Rule of Law which also spread to developing countries such as Indonesia, and therefore this principle as a basis for every human being who perform law enforcement in this country without exception. State law is a state based on law not based on sheer power, the law states the legal position is the highest position (the rule of law / rule of law). Yag and formulation issues raised in this study are as follows: 1. How do traffic enforcement policy, in case of criminal offenses traffic accident? and 2. How traffic enforcement, in the event of traffic accidents criminal offense according to Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation?. The data obtained by means of literature or of literature. that. Include: 1) .This material primary law, a material that has a binding force in the form of: (1) .Undang-Law No. 1 Year 1946 jo Law No. 73 Year 1958 About the Code of Penal (Penal Code). (2) .Undang Law No. 8 of 1981 About the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). (3) .Undang-Law No. 2 Year 2002 on the Indonesian National Police. (4) .Undang Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. Secondary law, which provides an explanation of the primary legal materials, including draft legislation, research, works of the law / literature. The names of literature is cited by the authors in the Bibliography, tertiary legal materials, ie legal materials that provide instructions or explanations of the primary and secondary legal materials, including dictionaries, scientific articles, and others as a supporter.

Key Word : Law Enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Teoritis dan Bagan Teori.....	15
E. Metode Penelitian	38

BAB II : DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN KONSEP

A. Pengertian Teori Hukum	42
B. Teori Penegakan Hukum	47
C. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	51
D. Tujuan Hukum.....	53
E. Pengertian Tindak Pidana	68
F. Kecelakaan Lalu Lintas, Akibat Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	74
G. Kealpaan (<i>Culpa</i>)	80
H. Pengertian Penyidik Dan Penyelidik	84
I. Menjalankan Undang-undang dan menafsirkannya dengan kecerdasan IQ, EQ, dan SQ	87

BAB III : KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS BILA TERJADI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS	
A. Kebijakan Penegakan Hukum Lalu Lintas	90
B. Dasar Pertimbangan Penyidik Menghentikan Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Tangerang	117
BAB IV : PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS BILA TERJADI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS	
A. Penegakan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas	128
B. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polisi Lalu Lintas Sebagaimana Yang di Maksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	145
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	152
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	